LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN(STD-B)
 KABUPATEN : BANDUNG
 KECAMATAN :

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. NomorKTP :
- 4. Alamat :

B. DataKebun

I. Kebun1

- Lokasi/ TitikKoordinat kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (*sertipikat hakmilik/girik / SKT/sewa/...*)
- Nomor :
- Luasareal :hektar
- Jenistanaman :,.....,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- JumlahPohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/campuran dengantanaman ...*)
- JenisPupuk :
- Mitrapengolahan :
- Jenistanah : (*mineral/gambut/mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usahala indi lahan kebun :

II. Kebun2*)

- Lokasi (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : (*sertipikat hakmilik/SKT/girik/sewa/...*)
- Nomor :
- Luas :hektar
- Jenistanaman :,.....,
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih/Bibit :
- JumlahPohon :
- Pola Tanam : (*monokultur/campuran dengantanaman ...*)
- JenisPupuk :
- Mitrapengolahan :
- Jenistanah : (*mineral/gambut/mineral+gambut*)
- Tahun tanam :
- Usahala indi lahan kebun:

III. (dan seterusnya)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
,..... 20.....

An. Bupati Bandung
 Kepala BPMP Kabupaten Bandung

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lebih dari 1 (satu) lokasi

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

KAPASITAS PALING RENDAH USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IUP-P*

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	KelapaSawit	5ton TBS perjam	CPO, intisawit(<i>palm kernel</i>), tandankosong, cangkang,serat (<i>fiber</i>), <i>sludge</i>
2.	Teh	1ton pucuk segar perhari	Teh Hijau
		10ton pucuk segar perhari	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	GulaKristal Putih

*)Untuk izin usaha industri pengolahan komoditas perkebunan selain kelapa sawit,teh dan tebu diberikan oleh instansi yang membidangi perindustrian.

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT TANDADAFTARUSAHAINDUSTRIPENGOLAHAN
HASILPERKEBUNAN(STD-P)

KABUPATEN : BANDUNG
KECAMATAN :

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama :
2. Tempat/ tanggal lahir :
3. NomorKTP :
4. Alamat :

B. DataUnit Pengolah

I. Unit Pengolah1

1. Nama :*)
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitasproduksi : (*terpasang/ terpakaimenurutsatuan*)
4. Jenisbahan baku : (TBS/.....)
5. Sumberbahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenisproduksi : (CPO/.....)
7. Tujuanpasar :

II. Unit Pengolah2

1. Nama :
2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitasproduksi : (*terpasang/ terpakaimenurutsatuan*)
4. Jenisbahan baku : (TBS/.....)
5. Sumberbahan baku : (desa/kecamatan/kabupaten)
6. Jenisproduksi : (CPO/.....)
7. Tujuanpasar :

III.(dan seterusnya)

.....,.....20.....

An. Bupati Bandung
Kepala BPMP Kabupaten Bandung

.....

*)*untuk seluruh komoditas perkebunan*

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....bertempat di.....,kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT.yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (koperasi perkebunan) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat perjanjian pasokan bahan baku dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
HAKDANKEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. bersama-sama dengan Bupati memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen,dsb.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan bahan baku kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
 - b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
 - c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar;
 - d.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama
 - b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen;
 - c.

Pasal 2
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), maka.....(ditentukan bersama oleh para pihak)
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka..... (ditentukan bersama oleh para pihak)

Pasal 3
MASABERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berkala setiapbulan/tahun sekali.

Pasal 5
(dst sesuai kebutuhan)

Pasal
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintah kabupaten Bandung sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak pemerintah kabupaten Bandung tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Bupati.

Parapihak:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas.....

(.....)

(.....)

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER